



Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

| Suara Merdeka | Jateng Pos | Jawa Pos  | Koran Tempo | Wawasan |
|---------------|------------|-----------|-------------|---------|
| Tribun Jateng | Sindo      | Republika | Kompas      |         |

Halaman 7

## Proyek Gedung Dewan Morowali Utara Dipersoalkan

**BPK merekomendasikan kelayakan lokasi dan biaya dikaji ulang.**

**Agoeng Wijaya**

[agoeng\\_w@tempo.co.id](mailto:agoeng_w@tempo.co.id)

**PALU** — Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak penegak hukum mengusut dugaan korupsi dalam proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Morowali Utara. Mereka menuding penganggaran proyek yang kini dihentikan tersebut tak sesuai dengan prosedur serta sarat kolusi dan nepotisme. “Sejak awal proyek ini terkesan dipaksakan karena gedung lama DPRD masih layak pakai,” kata Ketua Gerakan Pemuda Morowali Utara, Seprianus Nggaluku Gonti, kepada *Tempo*.

Seprianus memaparkan proyek kantor baru DPRD tersebut dianggarkan secara bertahap mulai tahun lalu senilai Rp 15 miliar. Belakangan, proyek tersebut dihenti-

kan sementara menyusul adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi.

Menurut Seprianus, GPMU telah melaporkan kejanggalan proyek gedung baru tersebut karena lahan yang digunakan merupakan milik Ketua DPRD Morowali Utara Syarifuddin Madjid. “Kami menemukan indikasi alokasi anggaran untuk proyek tersebut juga tak dibahas di Badan Anggaran DPRD,” ujarnya.

Hal senada diutarakan Ketua Banteng Muda Indonesia dan Pospera Morowali Utara, Arman Marundu. Dia mengklaim telah mengadukan persoalan dalam proyek gedung baru itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Oktober tahun lalu. Dia menilai biaya pembebasan lahan seluas

hampir 1 hektare untuk gedung tersebut, yang disinyalir mencapai Rp 580 juta, kemahalan lantaran lokasinya tak terletak di jalan poros utama kabupaten.

Selain itu, dia menilai, Morowali Utara sebagai daerah otonom baru—hasil pemekaran Kabupaten Morowali pada 2013—lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti puskesmas, jalan desa, dan sarana pendidikan. “Bukan kantor baru DPRD,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara, Yalbert Tulaka, membantah tak adanya pembahasan dalam penganggaran proyek. “Apalagi DPRD sendiri yang mengusulkan gedung baru itu,” ujarnya kepada *Tempo*. Yalbert membenarkan bahwa lahan terse-

but semula dimiliki Ketua DPRD Syarifuddin Madjid. Tapi dia memastikan biaya pembebasan lahan sekitar Rp 600 juta telah sesuai dengan nilai jual obyek pajak.

Syarifuddin Madjid pun tak menampik lahan untuk kantor baru Dewan itu semula adalah miliknya. “Tanah saya, bukan hanya itu, masih banyak lainnya yang dipakai pemerintah daerah untuk kantor, taman, dan jalan. Bahkan ada yang belum dibayar,” kata Syarifuddin kepada *Tempo*, Kamis pekan lalu.

Dia enggan menanggapi tuduhan adanya korupsi dalam proyek tersebut. “Saya anggap tidak masalah. Biarkan saja. Itu hak mereka. Terserah mereka yang melapor,” kata Syarifuddin. Menurut dia, kantor baru diusulkan lantaran gedung DPRD saat ini sudah tak layak. “Kantor yang ada masih darurat. Sifatnya sementara.”

Fatikhah Astri, dari Humas BPK Provinsi Sulawesi Tengah, membenarkan bahwa lembaga telah merekomendasikan Bupati Morowali Utara untuk mengkaji kembali kelayakan teknis lokasi dan biaya penyelesaian pekerjaan gedung baru DPRD tersebut. “Sebelum pengambilan keputusan lebih lanjut,” kata dia kepada *Tempo*.

● AMAR BURASE